

Buletin *Bappebti*

Mengabdikan Dengan Integritas

24

**NASABAH INGIN
TRANSAKSI LOT
YANG KECIL**

30

**SIAPA BISA MENJADI
PENGELOLA SRG?**



**RENCANA WAJIB
TRANSAKSI
MULTILATERAL**

EDISI 208

JUNI 2019



Persebaran Pasar Lelang Komoditas



11 PL

Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perdagangan



3 PL

Daerah sudah melakukan revitalisasi



7 PL

Swasta Murni

*Keterangan

MKG: PT Meukat Komuditi Gayo

IPASAR: PT Ipasar Indonesia

ACM: PT Asia Commodity Marketplace

POSINDO: PT Pos Indonesia

PKJ: PT Pasar Komoditas Jakarta

BKI: PT Bahtera Komoditi Indonesia

APCM: Asia Pacific Commodity market





Dari Redaksi

Pembaca **Buletin Bappebti** yang budiman,

Tak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2019. Pada tengah tahun ini Bappebti mengungkapkan rencana meningkatkan kewajiban transaksi multilateral yang sebelumnya ditetapkan minimum 5 persen dari total lot transaksi yang dicapai oleh setiap pialang, menjadi 15 persen. Ketentuan baru ini dilakukan dengan hati-hati dan bertahap mengingat peningkatan tersebut diyakini tidak serta merta bisa dilaksanakan melihat kondisi riil yang dihadapi para pialang. Namun kebijakan ini perlu diambil demi kebaikan bersama untuk kemajuan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) secara menyeluruh. Mengapa Bappebti melakukan langkah ini dan apa reaksi pialang dan *stakeholder* PBK lainnya, kami angkat dalam Berita Utama edisi Juni ini.

Prospek PBK tampaknya tetap menarik, terbukti dengan lahirnya pialang baru PT OTM Kapital Berjangka (OTM) yang baru saja memperoleh izin operasional dari Bappebti (rubrik PBK). Masih terkait perdagangan berjangka, kami juga hadirkan wawancara khusus Agung Wisnuaji yang tetap setia menggeluti dunia perdagangan berjangka sejak lepas kuliahnya dulu.

Simak juga analisis emas sebagai *Safe Haven*, regulasi tentang penyelenggara SRG dan potret kegiatan kami di Bappebti dan Kementerian Perdagangan, serta perkembangan berbagai komoditi dalam rubrik Aktualita.

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi **Buletin Bappebti** silakan hubungi kami melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109-901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, **Redaktur:** Nusa Eka, **Penyunting / Editor:** Sentot Kamaruddin, Muhammad Rivai Abbas, Apriliyanto, **Fotografer:** Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, **Sekretaris:** Yudi Ahmad Wahyudi, **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

f Bappebti Kementerian Perdagangan

t @InfoBappebti

ig @Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

DAFTAR ISI



PASAR BERJANGKA	10
PASAR LELANG	12
AGENDA FOTO	14
AKTUALITA	18
ENGLISH CORNER	22
INFO HARGA	28
ANALISIS	29

Rencana Wajib Transaksi Multilateral



Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan berencana meningkatkan kewajiban transaksi multilateral yang sebelumnya ditetapkan minimal 5 persen menjadi 15 persen. Rencana ini tentu mengundang pandangan yang berbeda dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pialang. Yang pasti kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan transaksi multilateral dan juga likuiditas bursa berjangka, demi mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara penentu harga acuan komoditi dunia.

Halal Bihalal dalam rangka Idul Fitri 1440 Hijriah merupakan momen yang sangat baik untuk menjalin silaturahmi, tak terkecuali bagi Bappebti dan *stakeholder* dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK). Semua perwakilan di bidang ini, yaitu Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo), dan juga para pialang berkumpul pada Selasa, 11 Juni 2019 di Jakarta, untuk saling merekatkan hubungan baik.

Di sela-sela kesempatan ini Kepala Bappebti, **Indrasari Wisnu Wardhana**, mengungkapkan bahwa Bappebti akan meningkatkan kewajiban transaksi minimum perdagangan multilateral yang selama ini berlaku yakni 5 persen menjadi 15 persen, kebijakan untuk menaikkan komposisi ataupun porsi multilateral yang dilakukan oleh setiap pialang untuk meningkatkan peran perdagangan multilateral dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bappebti melihat pertumbuhan transaksi multilateral cukup menjanjikan dan untuk lebih meningkatkan peran perdagangan multilateral harus terus dilakukan.



Kepala Bappebti menjelaskan bahwa aturan lama yang berlaku minimum sebesar 5 persen didasarkan pada hitungan persentase dari total lot yang ditransaksikan oleh setiap pialang berjangka dan penyelenggara SPA setiap bulannya. Nantinya, dalam aturan baru, ambang batas minimum 15 persen merupakan kalkulasi dari volume transaksi dari kontrak multilateral dan SPA yang terjadi.

Misalnya jika sebuah perusahaan pialang melakukan 1 juta lot transaksi secara total dalam setahun, maka minimal transaksi multilateral yang terjadi adalah sebesar 150 ribu lot transaksi yang merupakan 15 persen dari total lot transaksi.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 85/BAPPEBTI/Per/10/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/2009 Tentang Penggerak Pasar (*Market Marker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, antara lain disebutkan:

- Pengaturan tentang tersedianya Penggerak Pasar (*Market Maker*) di Bursa Berjangka dan adanya kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dimaksudkan untuk meningkatkan volume perdagangan Kontrak Berjangka dan likuiditas perdagangan di Bursa Berjangka. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada Pedagang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk menjadi Penggerak Pasar (*market maker*) di Bursa Berjangka. Prosedur penetapan Penggerak Pasar (*Market Maker*) selanjutnya diatur

oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.

- Pihak yang bersedia menjadi Penggerak Pasar diberikan berbagai insentif diantaranya dikecualikan dari kewajiban melakukan jumlah minimum total transaksi kontrak berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti dimaksud. Jumlah minimum total transaksi yang wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka adalah 3.500 (tiga ribu lima ratus) lot setiap bulan. Sedangkan jumlah minimum total transaksi yang wajib dilakukan oleh Penyelenggara SPA adalah 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) lot setiap bulan. Penetapan jumlah minimum total transaksi ini juga bertujuan untuk mencegah Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA yang tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah.
- Peraturan ini juga mewajibkan Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA untuk melakukan transaksi multilateral di Bursa Berjangka minimal 5% (lima persen) dari total transaksi kontrak berjangka setiap bulan. Kewajiban ini akan mendorong Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA melakukan transaksi kontrak berjangka secara multilateral di Bursa Berjangka sehingga likuiditas Bursa Berjangka diharapkan dapat meningkat.

Selengkapnya klik:

http://website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2013-06-18_16-14-30_sk69.pdf
dan http://website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2013-06-18_16-11-14_sk71.pdf



“Kewajiban transaksi multilateral yang lebih besar diharapkan dapat mempercepat proses untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai penentu harga acuan komoditi dunia.”

—INDRASARI WISNU WARDHANA

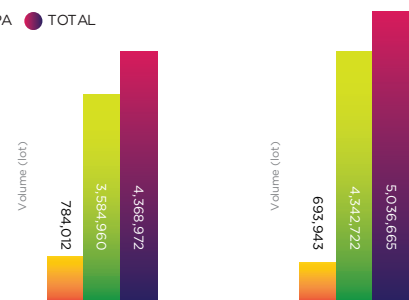
Kepala Bappebti menambahkan bahwa kebijakan peningkatan kewajiban untuk kontrak multilateral tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong para pialang untuk meningkatkan jumlah transaksi multilateral yang relatif masih kecil. Dengan transaksi multilateral yang lebih besar diharapkan dapat mempercepat proses untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai penentu harga acuan komoditi dunia. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah salah satu negara penghasil komoditi terbesar di dunia. Kopi, CPO (*crude palm oil*), jagung, kakao, karet, rumput laut, dan banyak lagi komoditi primer lainnya menjadi andalan produksi Indonesia. Namun demikian penentuan harga-harga komoditi tersebut masih ditentukan oleh negara-negara lain. Menurut Kepala Bappebti akan sulit untuk menjadi harga acuan komoditas dunia jika transaksi multilateral di bursa berjangka masih kecil. “Kita harus kembalikan fitrah perdagangan berjangka komoditi Indonesia dengan meningkatkan transaksi multilateral tersebut,” ujar Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana.

Wisnu menambahkan kewajiban minimum transaksi kontrak berjangka juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dari setiap bursa berjangka. Dengan target yang lebih besar tersebut diharapkan semangat untuk meningkatkan kontrak berjangka multilateral juga terpacu lebih tinggi. Ini merupakan tantangan besar yang harus diupayakan bersama-sama semua *stakeholder* dalam bidang PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) agar cita-cita menjadi penentu harga komoditi dunia bisa terwujud lebih cepat.

Berdasarkan data Bappebti yang diolah dari BBJ dan BKBI, selama periode Januari-Juni 2019 nilai transaksi multilateral secara total mencapai Rp7,179 triliun dengan jumlah lot sebesar 693.943 lot, sementara SPA sebanyak 4.342.722 lot dengan nilai transaksi Rp62,634 triliun. Kontrak multilateral ini relatif masih kecil, karena itulah Bappebti terus mendorong agar transaksi multilateral terus mengalami peningkatan.

MULTILATERAL SPA TOTAL

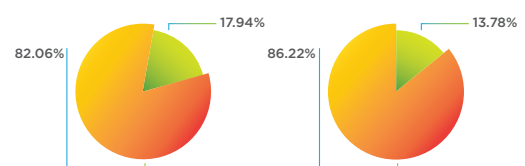
Grafik Volume Transaksi PBK (lot)



JAN-JUNI 2018

JAN-JUNI 2019

Chart Share Volume Transaksi PBK



Kapan aturan transaksi multilateral 15 persen ini diberlakukan? Bappebti belum menentukan waktu yang pasti. Namun demikian, Kepala Bappebti menyatakan aturan ini akan disertai dengan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pialang yang tidak mampu memenuhi kewajiban transaksi. “Sekarang ada sanksinya, mulai dari teguran hingga pembekuan perdagangan. Akan tetapi nantinya kebijakan ini tentu akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung sekaligus 15 persen,” kata Wisnu.

Apa Kata Pialang dan yang lainnya

Rencana pemberlakuan kewajiban 15 persen untuk transaksi multilateral bagi setiap pialang ini mendapat tanggapan berbagai pihak. Seperti dikutip *kontan.co.id* Direktur Utama PT Garuda Berjangka, **Ibrahim**, menyayangkan aturan ini, sebab meski perusahaannya sudah berhasil membukukan transaksi multilateral sebanyak 5 persen, tetapi masalah ini masih menjadi pekerjaan bagi pialang lain yang pencapaiannya di bawah standard lama. “Mau tidak mau sebagai pialang berjangka kita harus mengikuti,” ujar Ibrahim di sela-sela acara Halal Bihalal dengan Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia di Jakarta, Selasa (11/6). Ibrahim menyarankan perlu ada sosialisasi dan edukasi ke pialang dari Bappebti atau Bursa Berjangka terkait aturan baru ini. Idealnya, menurut Ibrahim, kontrak multilateral tahun ini masih mungkin ditingkatkan pada level 7 persen.

Senada dengan Direktur Utama Valbury Asia Futures (VAF), **Ricky Irawan**, menilai aturan baru cenderung membebankan pialang lain sebagai pelaku pialang berjangka, apalagi bagi mereka yang dengan target lama saja belum tercapai. Kata Ricky wajarnya porsi kewajiban kontrak multilateral berada pada level antara 5 persen hingga 7.

Sedangkan Direktur Utama PT Finex Berjangka, **Agung Wisnuaji**, yang turut serta dalam FGD (*Focus Group Discussion*) membahas masalah kenaikan transaksi multilateral di Bogor, menyampaikan pendapat bahwa kenaikan itu harus dilihat dari sisi kuantitatif atau kualitatif. Agung menyatakan kuantitatif itu maksudnya volumenya saja yang besar tetapi transaksinya tidak riil atau tidak dinikmati oleh masyarakat, karena bisa saja sebenarnya transaksi itu sudah diatur sebelumnya. Kalau transaksi kualitatif, yakni transaksi yang normal dimana ada investor, pabrikan, pedagang, dibutuhkan untuk gain dan untuk hedging, maka yang nilai 5 persen berkualitas akan lebih baik dari yang 15 persen tapi seolah-olah diatur transaksinya. “Target 15 persen itu tidak mudah dicapai dalam kondisi market yang sepi. Nah, menurut kami yang 15 persen itu sebaiknya adalah denda terhadap pialang yang tidak memenuhi target, misalnya karena mereka tidak fokus di multilateral. Lalu dendanya itu diberikan sebagai insentif terhadap *market maker* yang benar-benar menggerakkan pasar. Menurut saya cara ini lebih *fair*,” ujar Agung. Ia menambahkan yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menggerakkan *market* dengan transaksi yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat.

Sementara itu Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX), **Stephanus Paulus Lumintang**, mengatakan aturan ini tentunya akan disosialisasikan ke para Wakil Pialang Berjangka (WPB). Sampai akhir tahun ini BBJ bersama Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berencana akan melakukan sosialisasi ke 132 pialang di seluruh Indonesia. Direktur Utama Kliring Berjangka Indonesia, **Fajar Wibhiyadi**, mengaku bahwa sampai saat ini sudah melakukan pendekatan kepada 80 pialang. Paulus mengimbau agar pialang juga fokus terhadap kontrak multilateral tidak hanya bilateral. "Supaya bisa fokus, saran saya pialang berjangka hanya fokus dalam satu bursa berjangka saja," ujar Paulus.



Foto: Baqian KIP

Sekilas tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)



Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang di amandemen dengan UU No. 10/2011, menyatakan perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Perdagangan berjangka berlangsung melalui bursa berjangka. Transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan. Saat ini ada dua bursa berjangka yang beroperasi yakni BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan BKDI (Bursa Komoditi dan Derivarif Indonesia).

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar tersebut maka yang di "negoisasi"kan hanya harganya saja. *Performance* atau "terpenuhinya" kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kemudian dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Mekanisme Perdagangan

Secara umum mekanisme perdagangan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu multilateral dan bilateral. Multilateral adalah suatu mekanisme transaksi (jual/beli) antara banyak pihak dengan banyak pihak. Sedangkan bilateral adalah transaksi yang hanya dilakukan oleh satu pihak dengan satu pihak yang biasanya terjadi di luar bursa atau dikenal dengan *over-the-counter* (OTC).

Mekanisme multilateral diterapkan di dalam perdagangan berjangka bertujuan untuk proses pembentukan harga (*price discovery*), aktivitas lindung nilai (*hedging*), serta manfaat ekonomi lainnya. Mekanisme ini umumnya dapat dilakukan serah terima fisik komoditi. Sementara mekanisme di luar bursa (OTC) atau dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diselenggarakan untuk tujuan spekulasi dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai.

Secara teoritis, dilihat dari sistem pemasarannya yang kompetitif dan transparan, pasar berjangka dapat dikatakan pasar yang paling mendekati kesempurnaan suatu pasar. Dengan banyaknya penjual dan pembeli potensial yang melakukan transaksi dengan bersaing secara bebas, maka harga komoditi di pasar berjangka akan terbentuk secara lebih efisien.



Foto: Bagian KIP



Integritas PBK

Dalam upaya pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Bappebti telah meningkatkan integritas PBK dengan berbagai langkah, yakni:

1. Pembangunan Sistem Pengawasan Sistem Perdagangan Alternatif Bappebti.
2. Meningkatkan Pengawasan Integritas Keuangan Pelaku Usaha PBK.
3. Pembuatan perizinan secara *online* untuk 10 jenis izin/persetujuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
4. Meningkatkan Pelaksanaan Audit terhadap Pelaku Usaha PBK melalui *Risk Based Audit*.
5. Pengembangan sistem pelaporan keuangan secara elektronik (*e-reporting*) bagi pelaku usaha.
6. Penyempurnaan atas Peraturan Kepala Bappebti tentang Penggunaan Dana Kompensasi.
7. Penyempurnaan atas Peraturan Kepala Bappebti tentang pengelolaan Rekening Yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka.
8. Penyempurnaan atas Peraturan Kepala Bappebti tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka.
9. Penyempurnaan atas Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.
10. Penyempurnaan atas Peraturan Kepala Bappebti tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka.

Tangkap Prospek Perdagangan Berjangka



Transaksi multilateral yang berlangsung di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) maupun Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI/ICDX) menunjukkan terus pertumbuhan yang positif. Secara keseluruhan Bappebti mencatat pada tahun 2018 transaksi multilateral naik 14 persen dibandingkan tahun 2017 dan pada kuartal pertama 2019 meningkat 17 persen dibandingkan kuartal pertama 2018.

Tren positif ini ditangkap oleh PT OTM Kapital Berjangka (OTM) yang baru saja berdiri dan mendapat izin dari Bappebti. Perusahaan ini memang baru saja berdiri, namun menurut Direktur Utama OTM **Ryu Winata**, orang-orang di belakangnya merupakan wajah lama di dunia perdagangan berjangka. Ryu sendiri sudah berkiprah 15 tahun di perdagangan berjangka, sejak ia masih kuliah di Medan tahun 2005 lalu. "Peluang bisnis perdagangan berjangka ini masih sangat besar. Karena itu kami berani terjun ke bidang ini," ujar Ryu Winata di kantornya di bilangan Pluit, Jakarta Utara.

Ryu menjelaskan pada era digital seperti saat pengurusan izin perusahaan melalui Bappebti jadi lebih mudah. "Izin dari Bappebti sendiri hanya sekitar 2 bulan. Itupun karena dalam beberapa kasus kami harus meng-*upload* ulang karena ada ketidaklengkapan di pihak kita," kata Ryu. Secara keseluruhan kantor OTM beroperasi dalam tempo 6 bulan. "Dengan sistem *online*, kita langsung tahu apa saja yang kelengkapan berkas perusahaan yang masih kurang. Beda dengan sistem manual dulu, kalau petugasnya sedang keluar kantor misalnya, kita harus menunggu sampai dia kembali. Dengan sistem *online* responsnya cepat dan kita langsung diberi kabar apa saja kekurangan yang harus kita penuhi," kata Ryu.

Ryu menjelaskan jika dibandingkan dengan perdagangan berjangka Komoditi (PBK) di luar negeri, di dalam negeri kondisinya agak berbeda. Di luar negeri klien mencari pialang atau perusahaan untuk memutar uang mereka. Di Indonesia sebaliknya, perusahaan yang harus mencari nasabah agar mereka menanamkan investasinya dalam bidang perdagangan berjangka. Karena itu hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan edukasi kepada para calon nasabah atau klien. OTM menyatakan



Foto: Bagian KIP

akan menggencarkan literasi tentang bisnis PBK ini, khususnya untuk transaksi multilateral yang menjadi *core-business* OTM. “Kita akan melakukan edukasi, melakukan *training-training* kepada para calon nasabah agar mereka benar-benar mengerti bisnis ini, bisnis yang *high yield* tapi juga punya sisi *high risk* atau risiko tinggi. Karena itu calon nasabah harus benar-benar sampai mengerti, baru terjun ke bisnis ini,” kata Ryu.



Foto: Bagian KIP

Konsekuensi dari upaya ke arah itu OTM harus didukung oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Untuk itu OTM siap mengirimkan tenaga *marketingnya* untuk memperoleh *training* dari Aspebtindo agar nantinya dapat mengikuti ujian Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan dapat menjadi Wakil Pialang Berjangka yang resmi. Dengan dukungan WPB yang bagus Ryu yakin tingkat kepercayaan masyarakat dan nasabah makin tinggi kepada OTM.

Terjun ke bidang PBK dan mengambil segmentasi *market* pada transaksi multilateral, OTM yakin bisa *survive* dan maju mengingat perusahaan yang menekuni bidang ini masih sedikit, sehingga tingkat persaingannya lebih rendah. Berbeda dengan perusahaan di bidang SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) yang menjalankan transaksi bilateral yang jumlahnya sudah banyak. Lalu apa kelebihan yang ditawarkan oleh OTM kepada calon nasabahnya? “Melalui wakil pialang berjangka kami yang jempolan, kepada para nasabah selain memperkenalkan transaksi multilateral yang sifatnya *high risk high return*, juga akan kami arahkan mereka menjadi nasabah yang *high return low risk*. Kita akan ajarkan bagaimana caranya bertransaksi, walaupun sudah beberapa kali mengalami kerugian, tapi tetap cuan di ujungnya. Ini ilmu kita,” kata Ryu sambil menyatakan bahwa ilmu cuan ini merupakan menu rahasia perusahaannya.

Dengan pahit manis pengalaman dalam dunia perdagangan berjangka, dimana ia pernah mengalami kerugian hingga Rp 3miliar, Ryu akan memberi tips-tips kepada calon nasabah OTM agar bisa terus bertransaksi multilateral, antara lain memiliki manajemen risiko. “Jangan emosi, jangan serakah. Itu merupakan kunci sukses dalam transaksi multilateral. Selain itu juga jangan melakukan *trading* sendiri, harus ada pialang yang menemani. Karena kalau bergerak sendiri, nanti kita bisa-bisa kita ditemani setan *trading*, dimana *tradingnya* dilakukan seperti orang kesetanan dan ujung-ujungnya kita *loss*,” tambah Ryu sambil menambahkan bahwa OTM akan segera menyelenggarakan *event-event* guna menarik para calon nasabah transaksi multilateral.

Manfaat Penggunaan Sistem Informasi SRG dan PLK

Produksi dan perdagangan komoditas, khususnya komoditas pertanian bagi negara agraris seperti Indonesia merupakan sektor ekonomi yang menuntut perhatian serius dan terus menerus. Produksi komoditas pertanian dalam kuantitas dan kualitas yang cukup akan membantu menciptakan stabilitas ekonomi negara. Akan tetapi, hal itu hanya akan terwujud bila produksi yang ada bisa terdistribusi dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain para produsen yaitu petani bisa memperoleh keuntungan yang wajar atas penjualan hasil produksi mereka.

Terkait aspek produksi petani membutuhkan dukungan permodalan untuk membeli bibit dan sarana produksi, selain bimbingan teknis untuk menjaga kualitas produksi. Pada pasca produksi, persoalan yang kerap dihadapi petani yaitu fluktuasi harga komoditas di pasar. Pada masa panen harga komoditas akan cenderung turun karena melimpahnya pasokan. Petani sering tidak memiliki banyak pilihan kecuali menjual produksinya dengan harga relatif murah karena rendahnya posisi tawar mereka. Para petani umumnya akan segera menjual hasil produksinya ke pasar begitu panen tiba, karena mereka membutuhkan uang untuk menutup biaya produksi yang telah dikeluarkan yang tidak jarang diperoleh dari hutang, dan biaya hidup serta modal untuk menanam kembali.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menawarkan solusi melalui program SRG (Sistem Resi Gudang). Melalui SRG petani bisa menunda penjualan komoditas hasil produksinya sampai memperoleh harga yang wajar. Untuk itu komoditas hasil produksinya

bisa disimpan di gudang SRG. Sementara menunggu saat yang tepat untuk menjual produknya, petani bisa memperoleh pinjaman kredit dengan agunan resi gudang atas komoditas yang disimpan di gudang SRG. Sehingga mereka masih bisa membiayai hidupnya dan memiliki modal untuk mulai menanam kembali.

Sejak dijalankan tahun 2008 SRG telah mengalami berbagai perkembangan. Para petani di banyak daerah sudah merasakan manfaat atas keikutsertaan mereka dalam program SRG. Meskipun demikian diakui masih ada sejumlah masalah yang menuntut upaya perbaikan terus menerus. Dalam kaitan ini pemerintah terus berupaya mencari inovasi-inovasi guna mengoptimalkan penyelenggaraan SRG.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Salah satu inovasi yang sangat penting yaitu pengintegrasian SRG dengan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Pengintegrasian SRG dengan PLK dimulai pada akhir tahun 2016 dan hal itu bisa dilakukan berkat pemanfaatan teknologi informasi internet. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada peluncuran program tersebut menjelaskan, integrasi SRG dengan PLK bermanfaat untuk membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, serta mengatasi masalah jarak dan waktu. "Hal ini akan mengefisienkan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional," ungkap Mendag (CNN Indonesia, 6/12/2016).



Sedangkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, integrasi SRG dengan PLK bisa meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Studi yang dilakukan oleh tim peneliti Puslitbang APTIKA IKP, Balitbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yan Andriariza AS dkk, 2018) mengungkapkan, bahwa integrasi SRG dan PLK bisa memberikan beberapa manfaat bagi petani, yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif petani karena petani membentuk kerjasama bisnis baru dengan Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara PLK. Kerjasama bisnis ini otomatis dapat membantu petani untuk meningkatkan keakuratan data komoditasnya, seperti berat komoditas gabah yang dijual, kualitas gabah, data terkait harga, dan lainnya, karena semua data tersebut disimpan di *IS Ware* (sistem informasi SRG) dan dikelola oleh pengelola Gudang SRG, sehingga juga dapat membantu petani mengurangi risiko dari penipuan atau kecurangan administrasi yang dilakukan oleh pihak lain. Adanya kerjasama bisnis dengan pengelola Gudang SRG juga dapat membantu mengurangi

risiko kesalahan pengelolaan asset, karena asset yang selama ini dikelola sendiri oleh petani menjadi dikelola oleh pengelola Gudang SRG, dan pastinya hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga, dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan karena kepercayaan pelanggan yang meningkat.

Lebih jauh diungkapkan, pembentukan kerjasama bisnis dengan pengelola SRG dan penyelenggara PLK juga dapat mengurangi biaya pertemuan, biaya perjalanan dan biaya telekomunikasi dengan calon konsumen, karena semua sudah *online*. Penjualan komoditas petani dikelola oleh Pengelola Gudang SRG dan dijual secara *online* baik melalui pasar *online* maupun PLK *Online*. Semakin kecilnya interaksi antara petani dan konsumen otomatis dan juga metoda penjualan yang serba *online* yang dikelola oleh pengelola gudang SRG dan penyelenggara PLK tentunya akan semakin mempercepat proses transaksi pembelian komoditas gabah oleh konsumen kepada petani. Pengiriman tagihan kepada konsumen pun juga semakin cepat dilakukan, yang artinya petani semakin cepat mendapatkan uang tunai, yang dapat digunakan untuk proses tanam atau proses produksi selanjutnya. Proses produksi yang lebih cepat dimulai tentunya akan meningkatkan jumlah komoditas gabah yang siap dijual sehingga akan menaikkan pendapatan petani karena meningkatnya kapasitas bisnis. Dengan kapasitas bisnis yang semakin besar petani perlu mempunyai alternatif penjualan lain supaya hasil produksi gabahnya dapat terjual, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas pasar *online* dan PLK *online*, sehingga segmentasi pasarnya semakin meluas.

Mengingat manfaat yang cukup besar, penggunaan teknologi informasi dalam program SRG dan PLK tentunya patut didukung dan terus dikembangkan. Hingga kini penggunaan sistem informasi yang mengintegrasikan SRG dengan PLK sudah berlangsung selama sekitar dua tahun. Semoga berbagai manfaat tersebut sudah benar-benar dirasakan baik bagi petani maupun pengusaha SRG dan PLK, serta masyarakat secara umum.

Bappebti Tekankan Bisnis PBK Yang Beretika

Bisnis yang beretika dan taat aturan. Itulah inti dari arahan Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana ketika memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/6).

Dalam arahnya Kepala Bappebti mengingatkan kepada Pelaku Usaha PBK untuk menjalankan bisnis dengan etika dan menghindari praktek-praktek yang kurang baik, apalagi sampai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bappebti juga menyampaikan pentingnya meningkatkan transaksi perdagangan multilateral, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang diminati oleh pasar dunia antara lain komoditi CPO, Kopi, Karet dan Kakao. Para pelaku komoditi tersebut tentunya sangat membutuhkan sarana lindung nilai dan pembentukan harga, dan selama ini pangsa pasar yang besar tersebut justru dimanfaatkan oleh bursa berjangka di luar negeri.

Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK merupakan bentuk kerjasama antara Bappebti, Aspebtindo, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan tujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pialang Berjangka. Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK yang diselenggarakan di Makassar ini mengundang seluruh kepala cabang dan staff *compliance* Pialang Berjangka di wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan total peserta yang hadir berjumlah 50 orang, termasuk Koordinator Divisi Hukum & Keanggotaan PT. Bursa Berjangka Jakarta, Direktur Utama dan Direktur PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia, Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House dan Direktur Eksekutif Aspebtindo.





Foto: Bagian KIP

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, M. Syist, memberikan pemaparan terkait dengan implementasi Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* pada Pialang Berjangka. Sementara Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Widiastuti, menyampaikan Hasil Evaluasi Pengawasan Kepatuhan Pialang Berjangka.

Direktur Eksekutif Aspebtindo bersama-sama dengan Head of Learning Center PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan Koordinator Divisi Hukum & Keanggotaan PT. Bursa Berjangka Jakarta memberikan pemaparan kepada seluruh peserta mengenai persiapan pelaksanaan P4WPB.



: Kepala Bappebti: : Jaga Integritas : Industri PBK :

Foto: Bagian KIP



Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana berharap seluruh pihak yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat meningkatkan kegiatan usahanya dengan menjaga integritas industri PBK dan mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan serta berperan aktif mengawasi industri ini. Hal ini disampaikan saat sambutan acara halal bihalal PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) di Jakarta, Selasa (11/6).

Sertijab Eselon II Bappebti

.....

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyaksikan sekaligus memberikan pengarahan pada acara penandatanganan dan penyerahan memori serah terima jabatan Plt Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Sahudi kepada Widiastuti, Selasa (11/6). Dalam arahnya Kepala Bappebti menyampaikan dengan adanya mutasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja di berbagai unit di Kementerian Perdagangan.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan Plt Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Bappebti, Sahudi, kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Bappebti yang baru, Ninuk Rahayuningrum.

Foto: Bagian KIP





Foto: Bagian KIP

Literasi Tingkatkan Implementasi SRG

Sekretaris Bappebti Nusa Eka membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara Literasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang diadakan di Cirebon Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Acara dihadiri oleh 100 peserta, termasuk Kadis Perindag Kab Cirebon Deni Agustin, Perbankan, KBI dan Undangan lainnya (27/06).

Dalam arahnya Sekretaris Bappebti menyampaikan melalui Sistem Resi Gudang, Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan perekonomian daerah, terutama para petani dan pelaku usaha pertanian dengan implementasi SRG.



Ujian Calon WPB Angkatan II



Foto: Bagian KIP

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana memberikan membuka acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) Angkatan II Tahun 2019 yang berlangsung tanggal 27-28 Juni 2019 di Tangerang Selatan. Dalam pengarahannya Kepala Bappebti menyampaikan bahwa WPB sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan nasabah, memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan industri PBK.

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Komoditi diselenggarakan selama 2 (dua) hari dan terdiri dari 2 (dua) tahap. Tahap pertama ujian tertulis diikuti 97 orang, dan tahap kedua berupa ujian wawancara diikuti oleh 51 peserta yang dinyatakan telah lolos pada tahap ujian tertulis.



Mendag Bahas 3 Isu Penting dengan Australia

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membahas tiga isu perdagangan dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham. Pertemuan dilakukan di sela-sela kegiatan *G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy* di Tsukuba, Jepang, Sabtu (8/6). Tiga isu penting yang dibahas adalah perkembangan ratifikasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (RCEP), dan reformasi WTO.

Pertama, kedua negara menyepakati IA-CEPA masuk ke dalam proses ratifikasi setelah ditandatangani. Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, Indonesia dan Australia akan mempercepat proses tersebut agar secara resmi dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Kedua, Indonesia sebagai negara koordinator meminta dukungan Australia lebih fleksibel dalam mengenakan tarif dagang terhadap negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia. "Kita meminta Australia untuk tidak mengenakan tarif dagang yang terlalu tinggi kepada negara anggota RCEP yang belum memiliki perjanjian perdagangan dengan Australia," kata Mendag.

Ketiga, Indonesia mendukung reformasi WTO. Menurut Mendag, perlu adanya perbedaan yang jelas antara proses dan substansi dalam reformasi WTO. Hal tersebut juga telah disampaikan pada pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2019 di Chili beberapa bulan lalu. Fokus dan prioritas reformasi WTO saat ini adalah pada pemilihan anggota *Appellate Body*. Reformasi WTO diharapkan dapat mengembalikan fungsi WTO secara efektif dan memulihkan sistem perdagangan multilateral, serta kredibilitas WTO di mata dunia.



Walau Naik Batubara Masih *Bearish*

Harga komoditi batubara di bursa ICE Newcastle menurut data *Bloomberg*, Senin (10/6) pukul 19.00 WIB, untuk kontrak pengiriman Juli 2019 berada pada level USD 74,50 per metrik ton, naik 0,6 persen dibandingkan akhir pekan lalu USD 74,05 per metrik ton. Walau mengalami kenaikan, namun batubara masih berada dalam tren *bearish*. Selama sepekan harganya melemah 2,74 persen.

Batubara menghadapi cukup banyak masalah, antara lain dianggap menimbulkan polusi, sehingga membuat sejumlah negara memanfaatkan energi alternatif seperti angin dan matahari. Walau begitu keberadaan batubara diperkirakan masih akan tetap eksis di pasar energi dunia, sebab komoditi ini menjadi kepentingan ekonomi Cina dan Australia sebagai produsen utamanya. Bahkan jika harganya turun terus sampai level USD 50 per metrik ton, misalnya, batubara diperkirakan masih bisa menekan *capital market* dan berujung pada terjadinya krisis ekonomi.



Emas Antam dan Dunia Makin Kemilau

Harga beli emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Rp 673.004 per gram, Jumat (28/6), atau naik Rp 3.532 dibandingkan sehari sebelumnya. Harga jualnya juga naik cukup signifikan Rp 23.000, menjadi Rp 664.500 per gram. Berdasarkan *Indogold.com* harga beli emas pada akhir Juni ini merupakan tertinggi sejak 2017. Sebelumnya harga beli tertinggi menyentuh Rp 670.986 per gram pada 26 Juni lalu.

Sementara itu mengutip *Bloomberg*, harga emas global untuk jenis pengiriman segera berada pada level USD 1.417 atau naik 0,55 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sedangkan untuk jenis emas Comex sebesar USD 1.421 atau naik 0,67 persen pada kontrak Agustus 2019.

Sikap Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau *The Federal Reserve* (The Fed) yang berpeluang memotong suku bunga, serta memburuknya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran turut memicu peningkatan harga emas global saat ini. "Ketegangan perdagangan global, geopolitik, dan pembelian bank sentral menimbulkan resiko kenaikan harga emas," ujar Analisis Logam Mulia di Standard Chartered Bank di New York Suki Cooper, dikutip dari *Bloomberg*, Selasa (25/6).

Martin Lakos selaku Direktur Divisi di Macquarie Wealth Management Bank memproyeksikan harga emas bisa mencapai USD 1.450 per ounce pada kuartal pertama atau kedua tahun 2020.



Kartu Visa Uang Digital

Bursa mata uang digital (*cryptocurrency*), *Coinbase*, mengumumkan kartu debit Visa miliknya akan meluncur di enam negara Eropa setelah peluncuran di Inggris April 2019 lalu. Dengan kartu debit ini memungkinkan pengguna dengan akun *Coinbase* menggunakan *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Litecoin* untuk berbelanja di toko *offline* dan *online* di setiap pedagang yang menerima pembayaran menggunakan Visa.

CEO *Coinbase* Inggris, Zeeshan Feroz, seperti dikutip CNBC International menyatakan tujuan dari peluncuran kartu ini adalah untuk melakukan pembayaran dengan mata uang digital tanpa batas, layaknya membayar menggunakan uang tunai. "Anda dapat membeli bahan makanan dengan *Bitcoin* dan kemudian kopi dengan *Litecoin*," kata Zeeshan, Rabu (12/06). "*Coinbase Card*" akan tersedia di Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Irlandia, dan Belanda.



KTT G-20 Bahas Perdagangan Digital

Untuk pertama kalinya isu perdagangan digital dibahas pada KTT G20 yang berlangsung 8-9 Juni 2019 di Tsukuba, Ibaraki, Jepang. Negara-negara anggota G20 memandang transformasi digital berperan penting dalam menghasilkan peluang maupun tantangan bagi perdagangan saat ini.

Dalam pembahasan ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan, Indonesia tetap mengedepankan pentingnya tetap menghormati peraturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara, khususnya terkait pergerakan arus data dan informasi perdagangan, dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. "Penyimpanan dan pengamanan data strategis di dalam negeri menjadi hal utama. Selain itu, kita juga perlu memberikan perhatian khusus kepada mereka yang rentan secara ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga perdagangan digital dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif," ujar Mendag.

Persen, yoy

Komoditas	2016	2017	2018	YTD 2019*
Tembaga	-10,5	27,1	6,7	-4,2
Batu Bara	6,8	48,2	2,5	2,1
CPO	21,3	5,7	-19,2	-7,7
Karet	-2,2	-28,1	-16,8	19,0
Nikel	-15,4	8,9	27,8	-4,9
Timah	13,1	13,1	0,5	3,6
Aluminium	-3,5	22,9	7,4	-11,3
Kopi	4,3	-2,9	-15,4	-13,3
Lainnya	1,0	6,8	1,2	0,4
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	5,4	21,7	-2,8	0,0

Indeks Harga Komoditi Ekspor Negatif

Indeks harga komoditi ekspor Indonesia masih negatif, walaupun kecenderungannya menunjukkan adanya perbaikan. Laporan Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) Bank Indonesia (BI), Senin (24/6) mengungkapkan perlambatan ekonomi dunia berpengaruh pada penurunan volume perdagangan dan harga komoditi global.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan perlambatan perdagangan dunia masih terus berlanjut pada Triwulan II-2019. Perlambatan tersebut searah dengan perlambatan total perdagangan negara utama seperti Cina, Jerman, dan AS.

Harga komoditi ekspor Indonesia mengalami penurunan terutama CPO dan logam. Penurunan harga CPO dipengaruhi oleh tekanan turunnya harga komoditi substitusinya yaitu kedelai sebagai akibat produksi yang masih tinggi oleh produsen utama kedelai, yakni Amerika Serikat. Sementara harga batubara masih relatif terjaga. Hal ini seiring dengan gangguan produksi batubara di Indonesia akibat curah hujan yang tinggi dan peningkatan permintaan India. Harga karet juga masih tinggi, seiring dengan pasokan yang masih terbatas dan ekspektasi peningkatan permintaan dari Cina.



Harga Minyak Dunia Sedikit Membaik

Di tengah suasana penuh harap bahwa negara-negara pengekspor minyak OPEC akan memperpanjang kesepakatan pengurangan produksinya, harga minyak dunia mengalami kenaikan sedikit pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB, 28/6)

Minyak mentah berjangka AS, *West Texas Intermediate* (WTI), untuk pengiriman Agustus naik tipis USD 0,05 menjadi USD59,43 per barel di *New York Mercantile Exchange*, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus sedikit menguat USD 0,06 dan ditutup pada USD 66,55 per barel di *London ICE Futures Exchange*.

OPEC diperkirakan akan menggulirkan kesepakatan untuk mengurangi pasokan pada pertemuan minggu depan dan membahas pendalaman pembatasan, kata menteri perminyakan Irak. Sebuah sumber mengatakan kepada *Reuters* bulan ini bahwa Aljazair telah melontarkan gagasan memperdalam pengurangan sekitar 600.000 barel per hari.

Kesepakatan antara OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia untuk mempertahankan produksi sebanyak 1,2 juta barel per hari, berakhir pada akhir Juni. Pertemuan pada 1-2 Juli di Wina akan membahas langkah selanjutnya.

Periode Juli 2019: Harga Referensi CPO Turun dan Biji Kakao Naik

Harga referensi produk *Crude Palm Oil* (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Juli 2019 adalah USD 542,45/MT. Harga referensi tersebut turun sebesar USD 4,72 atau 0,86 persen dari periode Juni 2019 yang sebesar USD 547,17/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. "Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah USD 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/MT untuk periode Juli 2019," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

BK CPO untuk Juli 2019 tercantum sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Juni 2019 sebesar USD 0/MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Juli 2019 sebesar USD 2.454,93/MT naik 5,49 persen atau USD 127,66 dari bulan sebelumnya yaitu sebesar USD 2.327,27/MT. Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Juli 2019 menjadi USD 2.169/MT, naik 6,12 persen atau USD 125 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 2.044/MT.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. Namun naiknya harga referensi tersebut tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen.



Fluktuasi Harga Tambang Internasional Pengaruhi HPE Periode Juli 2019

Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) periode Juli 2019. Dibandingkan dengan HPE periode Juni 2019, sebagian komoditas mengalami penurunan dan sebagian mengalami kenaikan HPE.

Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019. "HPE beberapa produk pertambangan mengalami kenaikan maupun penurunan yang disebabkan oleh adanya fluktuasi harga internasional. Produk konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat ilmenit dan rutil yang mengalami kenaikan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

Sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK adalah konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, nikel, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian.

Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari *Asian Metal* dan *Iron Ore Fine Australian*. Sedangkan konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, nikel, dan bauksit bersumber dari *London Metal Exchange* (LME).

Beberapa produk tambang yang mengalami kenaikan untuk periode Juli 2019, antara lain konsentrat besi (hematit, magnetit) ($\text{Fe} \geq 62\%$ dan $\leq 1\% \text{TiO}_2$) dengan harga rata-rata USD 87,65/WE atau naik sebesar 10,50%, konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ($\text{Fe} \geq 50\%$ dan $(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2) \geq 10\%$) dengan harga rata-rata USD 44,79/WE atau naik sebesar 10,50%.

Beberapa produk yang mengalami penurunan dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat tembaga ($\text{Cu} \geq 15\%$) dengan harga rata-rata USD 2.218,58/WE atau turun sebesar 2,73%, konsentrat mangan ($\text{Mn} \geq 49\%$) dengan harga rata-rata USD 275,35 /WE atau turun sebesar 3,76%, konsentrat timbal ($\text{Pb} \geq 56\%$) dengan harga rata-rata USD 760,22/WE atau turun sebesar 0,85%.

Indonesia Supports Simplification of Trade Procedures

The Indonesian government supports efforts to simplify international trade procedures. Expert Staff for International Relations, Ministry of Trade, Dody Edward, revealed that lately tariff barriers to international trade have declined. However, on the other hand there is an increasing tendency of non-tariff trade barriers that rely on the application of health, safety, and environmental safety standards.

“Incorrect application of trade barriers related to non-tariff impacts on increasing trade costs and administrative costs in international trade which can ultimately be protectionism,” Dody explained.

Dody Edward delivered the statement at the opening of the workshop “Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Workshop on Best Practices of Trade Facilitation Agreement Implementation within APEC

Economies: Opportunities and Challenges” in Badung Regency, Bali, Wednesday (6/19/2019).

As reported by the website kemendag.go.id, Dody hopes that the application of the Trade Facilitation Agreement (TFA) can simplify international trade procedures so that it is more transparent and non-discriminative.

The workshop was held to improve the ability of APEC economic members to carry out their commitments to the TFA, especially with regard to simplifying export / import procedures. In addition, the workshop also facilitated members to share knowledge and experience in implementing TFA in accordance with the agreement in the World Trade Organization (WTO). The event which lasted for two days was attended by 125 participants who came from APEC Economics members.

Foto: Bagian KIP



RI-Australia Minister of Trade Discusses Three Issues

Indonesian Minister of Trade Enggartiasto Lukita met Australian Minister of Trade, Tourism and Investment Simon Birmingham on the sidelines of the G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy in Tsukuba, Japan, Saturday (06/08/2019). In the meeting they discussed three trade issues, namely the development of the ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP), and WTO reforms.

Minister Enggar explained that the two countries agreed that the IA-CEPA entered into the ratification process after it was signed. To meet the needs of the business

world, Indonesia and Australia will accelerate the process so that it can be formally utilized by all parties. “We agreed to accelerate the completion of the IA-CEPA ratification process so that Indonesia-Australia trade and investment cooperation can be immediately implemented,” he said.

Enggar explained, Indonesia as the coordinator asked for Australian support to be more flexible in imposing trade tariffs on RCEP member countries that did not yet have a trade agreement with Australia. “We ask Australia not to impose too high trade tariffs on RCEP member countries that do not yet have trade agreements with Australia,” the Trade Minister said.

Foto: Bagian KIP



Government Encourages Utilization of E-Commerce For Export Increase

Director of Export Development Cooperation, Ministry of Trade Marolop Nainggolan revealed that the government encourages businesses to use e-commerce for marketing their products. According to Marolop, e-commerce can also be used to increase exports, including non-oil export products which are targeted to increase 7.5 percent this year compared to the previous year.

Marolop Nainggolan said that in a seminar and business clinic with the theme "Expansion of the Share of Indonesian Products in Foreign Markets through the Utilization of E-Commerce" in Malang, East Java, June 19, 2019.



Foto: Bagian KIP

According to Marolop, e-commerce eases entrepreneurs who want to export their products without opening a shop in the destination country. One program that facilitates business people to utilize digital technology, especially e-commerce, is the Digital Handholding Program (DHP).

DHP is an Indonesian consulting services program in the field of information technology (digital) conducted by the Indonesian Export Financing Institution, LPEI. This program provides assistance, facilitation, and empowerment for export-oriented small and medium enterprises to be able to market, expand market access, promote, and increase the competitiveness of its superior products in global market places (global commerce).

"By joining this program, businesses can develop capacity, get business advisors, and participate in special export training programs," Marolop added.

Need to Increase Human Resources in the Export Sector in the Industrial Revolution 4.0

The Director General of National Export Development, Ministry of Trade, Arlinda revealed the importance of increasing human resource capabilities in the export sector, more so in the current 4.0 industrial era. Arlinda delivered her opening remarks in the discussion "Opportunities and Challenges of the Industrial Revolution 4.0 on Increasing the Capacity of Human Resources Readiness for Export" in Jakarta (6/27).

According to Arlinda, HR capability is the key to increase exports. Through discussion forums like this, participants can get a lot of information to broaden knowledge related to exports.

"Through this forum, the facilitators, stakeholders, and management of the Indonesian Export Education and Training Center (PPEI) can meet each other to build cooperation and see opportunities to improve human resource capacity," said Arlinda.



Foto: Bagian KIP

In addition, the participants also received information related to trade policies, and programs and strategies for developing national exports from the Ministry of Trade's Directorate General of National Export Development.

Wide range of information on export development strategies obtained from this forum, according to Arlinda, can be conveyed to small and medium businesses (UKM) and prospective exporters.

Arlinda also said, to support the successful development of export human resources, PPEI had 160 facilitators who were practitioners, exporters, and agency representatives.



Agung Wisnuaji
Direktur Utama PT Finex Berjangka

Nasabah Ingin Transaksi Lot Yang Kecil

Sudah hampir dua dekade **Agung Wisnuaji** menggeluti transaksi komoditi. Ayah dua anak ini tetap setia menggeluti dunia perdagangan berjangka (PBK) karena menilai lebih asyik daripada transaksi di bursa saham. Kini pria 43 tahun ini yang menjadi Direktur Utama PT Finex Berjangka sedang menggenjot transaksi multilateral Olein10 di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Berikut ini percakapan khusus Buletin Bappebti dengan Agung di kantornya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan:

Buletin Bappebti: *Sejak kapan bergabung dengan PT Finex Berjangka?*

Agung Wisnuaji: Saya bergabung sejak bulan Oktober 2014, jadi sudah hampir 5 tahun. Sebelumnya saya di PT Jalatama Artha Berjangka dari tahun 2000.

Buletin Bappebti: *Latar belakang pendidikan di bidang ekonomi?*

Agung Wisnuaji: Benar, saya lulus dari akuntansi STIE YKPN, Yogyakarta, lulusan tahun 1998.

Buletin Bappebti: *Langsung masuk ke bidang PBK?*

Agung Wisnuaji: Setahun setelah lulus, saya ke Jakarta. Tahun 2000 saya masuk kerja di PT Jalatama, kemudian pindah ke Finex tahun 2014. Dulu, waktu di kampus saya pernah mengikuti simulasi saham dari Bursa Efek Indonesia. Sejak itu saya mulai tertarik dengan dunia bursa. Setelah ke Jakarta, ternyata saya baru tahu ada bursa lain, yaitu bursa komoditi yang mekanismenya hampir sama dengan saham, tetapi produknya berbeda. Saya jadi penasaran. Tentang saham sendiri sudah banyak orang tahu, tapi mengenai bursa komoditi, saya lihat merupakan hal yang berbeda. Kalau saham fokusnya ada di korporat, sedangkan bursa komoditi kan produknya komoditas lokal, dimana Indonesia sebagai negara agraris tapi bursanya (Bursa Berjangka Jakarta-BBJ) baru muncul. Ini yang sebenarnya saya lihat masih menyimpan banyak peluang kedepan.

Kalau di luar negeri, seperti AS sudah sangat umum. Kedelai, jagung, daging, karet alam diperdagangkan di bursa, fisik dan juga *futures*-nya. Kalau di saham kan hanya bulan *spot*, tapi kalau di bursa komoditi ada kontrak berjangka, yang manfaatnya bisa buat *hedging*. *Hedging* inilah yang manfaatnya besar sekali bagi pabrikan, pedagang, maupun petani atau pemilik perkebunan.

Dulu ada cengkeh, saat harga cengkeh naik, petani bisa beli TV dan sebagainya. Kemudian harga jatuh dan petani hancur. Kalau ada instrumen yang bisa mengatur harga lebih transparan, sarana *hedging*/lindung nilai, ada yang mengatur kualitas, tata niaganya, maka petani, pemilik kebun, pabrikan dapat mengurangi risiko kerugian.

Manfaat bursa komoditi sebagai sarana *hedging*, *gain oriented*, maupun serah terima fisik ini sampai sekarang belum dioptimalkan. Sepertinya tidak jalan. Tahun 2000-2004 sudah pernah terjadi transaksi serah terima fisik. Olein juga sempat serah terima fisik. Tapi yang namanya juga bursa masih baru, maka wajar kalau ada yang tidak sempurna. Misalnya, pialang berjangka yang belum punya pengalaman soal serah terima fisik, sehingga pialang jadi kerepotan. Dulu salah satu kendalanya di situ.

Buletin Bappebti: *Sekarang bagaimana perkembangannya?*

Agung Wisnuaji: Sekarang sudah ada produk komoditi yang tidak perlu serah terima fisik, dan pergerakan harganya cukup likuid, ini bisa jadi solusi tidak hanya buat *hedging* tapi juga untuk memperoleh *gain* (keuntungan). Pada saat ini untuk men-*trigger* likuiditas market di bursa, dibuat instrumen produk yang tidak terlalu rumit dan nilai kontrak yang lebih kecil. Misalnya pada produk Olein 10 Ton. Ini bisa mendorong investor yang dulu pernah bertransaksi di Olein 20 Ton untuk masuk ke Olein 10 Ton. Diharapkan Olein 10 Ton bisa menarik nasabah yang dulu bermain di Olein 20 Ton. Kalau Olein 20 Ton saat ini spread-nya terlalu besar. Yang bagus sekarang spreadnya adalah Olein 10 Ton. Yaitu berkisar Rp 10,- sampai Rp 30,-, bahkan tidak jarang juga spread hanya Rp 5,- (1 *tick*). Dengan *spread* yang kecil, maka investor memiliki lebih banyak peluang untuk memperoleh keuntungan, dan transaksi dengan volume yang lebih banyak.

Inilah produk yang sedang kami galakkan dan kami sedang menarik lebih banyak nasabah untuk masuk lagi ke bursa. Kami menawarkan produk turunan CPO ini kepada para pedagang besar maupun kecil dan juga pabrik yang dulu aktif di bursa tapi kemudian sempat vakum tidak bertransaksi lagi.

Nah, kami lihat sekarang di BBJ sudah ada *market maker*. Makanya sekarang harganya sudah likuid. Karena itu kami mulai ajak nasabah masuk lagi untuk transaksi. Memang ini baru berjalan sejak Juli 2019. Namun saat ini transaksinya sudah mencapai sekitar 500 hingga 2.000 lot per hari. Masih kecil jumlahnya, tapi kami optimis akan tumbuh terus.

Buletin Bappebti: *Siapa mereka yang melakukan transaksi?*

Agung Wisnuaji: Para pelaku perdagangan olein ini biasanya bertransaksi juga di bursa Malaysia. Di sana transaksinya bisa sampai 20.000 lot per hari. Dan tidak sedikit Investornya berasal dari Indonesia. Makanya, kami ajak mereka ke bursa kita di sini. Kami membuat terobosan, kami datang orang-orang yang *trading* di Malaysia. Kami jelaskan bahwa di sini transaksinya pakai rupiah, jadi tidak perlu ada risiko perbedaan kurs mata uang rupiah dengan ringgit. Untuk setoran dan penarikan dana pun lebih mudah karena menggunakan beberapa bank lokal. Kami yakinkan juga bahwa sekarang tidak perlu lagi *trading* di Malaysia. Cukup di sini saja, pialangnya juga di sini (di Jakarta), dilindungi oleh Bappebti.

Buletin Bappebti: *Bagaimana gambaran simple-ya bagi orang awam?*

Agung Wisnuaji: Untuk produk olein itu sederhananya adalah produk minyak goreng curah. Untuk kebutuhan minyak goreng kita. Jadi ini produk yang memang menjadi kebutuhan kita. Lalu, bagaimana pergerakan perdagangannya? Olein dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Untuk menganalisa pergerakan harga Olein secara fundamental, maka Investor dapat memperhatikan musim tanam dan panennya. Selain itu juga melihat kapan waktu tertentu saat harganya naik, misalkan saat hari raya. Kalau panen bagus, stok bertambah, harga cenderung turun. Kalau lebaran misalnya, permintaan naik, stok turun, maka harga cenderung naik. Nah, silakan perkirakan kapan beli dan kapan jualnya.

Kami sarankan juga, Investor harus memiliki perencanaan *Capital Management* yang baik. Sama seperti kita buka restoran, kalau pembelinya kurang, mau terus bertahan atau tutup saja sebelum modal habis. Kalau kira-kira restorannya tidak laku ya tutup



Foto: Bagian KIP

saja. Begitu perumpamaan sederhananya. Untuk itu kami siap membantu nasabah untuk mempersiapkan rencana pengelolaan keuangannya.

Buletin Bappebti: *Di mana letak asyiknya bisnis komoditi ini dan di mana risikonya?*

Agung Wisnuaji: Kalau pasar saham kan yang kita pelajari adalah laporan keuangan perusahaan kebijakan pemerintah serta perekonomian global. Kalau komoditi kita juga dapat memperhatikan grafik *history*-nya, musim tanam, panen, area tanam, cuaca dan seterusnya. Masing-masing komoditi punya karakteristik yang berbeda. Kopi misalnya, area tanamnya di Sumatera, kemudian terjadi bencana. Maka, harganya pun akan terpengaruh.

Nah, Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan komoditi. Sayang sekali kalau harganya justru ditentukan oleh negara lain. CPO misalnya ditentukan oleh Malaysia, karet ditentukan oleh Jepang, kopi juga demikian jangan ditentukan oleh negara lain.

Buletin Bappebti: *Peran pembentukan harga itu ada pada pihak siapa?*

Agung Wisnuaji: Pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan, bursa berjangka bertugas mengkaji produk-produk yang diminati oleh masyarakat. Sementara pialang itu seperti prajurit yang berada di depan untuk melakukan edukasi, sosialisasi mengenai sistemnya, tata cara transaksi, memberikan layanan dan seterusnya. Jadi semuanya saling terkait. Dengan adanya komoditi di bursa lokal akan memudahkan orang untuk mengetahui harga komoditi kita secara transparan, dan produk-produknya sudah jelas mutunya.



Buletin Bappebti: *Bagaimana ke depan bisnis ini masih prospektif?*

Agung Wisnuaji: Saya tipikal orang optimis. Itu makanya saya tetap bertahan di dunia PBK sejak tahun 2000 sampai sekarang. Di Amerika dan negara-negara lain bisnis komoditi ini berjalan terus, kenapa kita harus pesimis. Kenapa kita tidak bisa? Kalau ada yang tidak jalan pasti ada yang salah, itu yang harus kita cari. Kan banyak yang bisa kita jadikan contoh, seperti CME, ICE, bahkan ada bursa APEX (Singapura) yang baru satu dua tahun yang transaksinya sudah besar. Apakah kita akan bertransaksi di sana atau menunggu mereka masuk ke Indonesia? Padahal kita punya bursa di sini.

Buletin Bappebti: *Finex sendiri sudah ada sejak kapan?*

Agung Wisnuaji: Finex sudah ada sejak 2012. Ketika itu saya diminta untuk bergabung, saya waktu itu di komoditi desk di PT Jalatama yang menangani transaksi multilateral. Saya pindah ke Finex juga sebagai komoditi desk, dan saya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan multilateral.

Buletin Bappebti: *Finex lebih fokus ke bilateral?*

Agung Wisnuaji: Sebelumnya kami memang fokus di bilateral, namun kami juga berkomitmen mengembangkan multilateral. Untuk bilateral kami lebih fokus melalui *online*, karena itu kita tidak terlalu banyak punya *personal marketing*, karena lebih banyak *digital marketing*, karena *cost*-nya lebih murah, lebih terukur dan bisa menjangkau nasabah yang berada di daerah-daerah pelosok. Karena ternyata nasabah kami juga banyak dari kota-kota kecil, seperti di Palu, Aceh, dan Kalimantan.

Kalau di kota besar, orang-orang yang punya banyak uang tidak punya waktu untuk melakukan transaksi langsung sendiri. Dia cenderung mempercayakan kepada orang lain untuk menjalankan transaksinya. Berbeda dengan di daerah yang punya lebih banyak waktu untuk belajar dan melakukan transaksi sendiri. Karena itu walaupun mereka rugi, ya, mereka mengerti kenapa hal itu terjadi.

Dari sosialisasi yang kami lakukan di beberapa daerah, seperti di Depok, mereka mengusulkan agar Bappebti juga membolehkan transaksi yang lotnya lebih kecil, karena mereka menginginkan kalangan menengah ke bawah juga punya kesempatan untuk bisa trading.

Buletin Bappebti: *Sekarang mereka dari kalangan menengah bawah bisa ikut bertransaksi?*

Agung Wisnuaji: Produk Olein sebelumnya hanya ada yang 20 ton, sekarang dengan nilai kontrak yang lebih kecil yakni 10 ton. Begitu juga forex, sekarang dengan modal 5 juta bisa ikut *trading*, tapi untuk multilateral minimal masih 50 juta baru bisa *trading*. Karena itu kami harapkan produk-produk komoditi bisa tersedia dengan lot-lot yang lebih kecil, sehingga lebih banyak orang bisa ikut transaksi. Sementara kita tahu bahwa broker-broker asing, terutama yang ilegal, menawarkan lot-lot kecil. Misalnya dengan Rp100 ribu saja sudah bisa bertransaksi. Kalau kita bisa lakukan yang sama akan lebih menarik dan yang pasti transaksi di kita kan lebih jelas dan aman daripada melalui broker asing.

Buletin Bappebti: *Kabarnya Finex pernah mengalami masalah dengan web yang dimiliki?*

Agung Wisnuaji: Ya, dulu pernah mengalami web kami dibajak. Izin-izin kami dibajak, bahkan alamat kantor juga. Nama dirut dan nomor telpon saja yang diganti, semuanya dibuat sama. Kami baru mengetahui dibajak dari nasabah, yang menanyakan bahwa Finex menawarkan keuntungan 20 persen. Bahkan ada nasabah dari Medan datang ke kantor kami untuk mengecek. Kami jelaskan, bahwa yang di web itu bukan Finex Berjangka yang kami kelola.

Kendalanya adalah, kami belum bisa mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib karena dinilai belum ada kerugian materil yang kami alami. Maka kami siap membantu masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya *website* palsu tersebut ke divisi *cybercrime* di Kepolisian. Kami juga sudah melaporkan masalah ini ke Bappebti, Satgas Investasi OJK, BBJ, KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Kami katakan bahwa nama Finex dibajak oleh pihak lain.

Harga Beras Domestik Turun

Secara umum harga beras di pasar domestik pada bulan Mei 2019 turun sebesar -0,45 persen jika dibandingkan harga pada bulan April 2019. Namun dibandingkan bulan yang sama tahun 2018 ada kenaikan sebesar 0,42 persen. Penurunan harga selama bulan Mei 2019 ini disebabkan panen raya pada bulan April, sehingga stok gabah mencukupi. Stok gabah yang cukup juga dapat terlihat dari harga gabah kering panen (GKP) baik di tingkat petani maupun di penggilingan selama bulan Mei 2019 yang mengalami penurunan.

Fluktuasi harga beras selama satu tahun periode Mei 2018 - Mei 2019 masih relatif stabil dibandingkan periode satu bulan sebelumnya dengan nilai Koefisien Variasi (Kovar) sebesar 1,21 persen. Sedangkan harga di tingkat konsumen selama periode tersebut tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 14.021/kg menjadi Rp 13.958/kg.

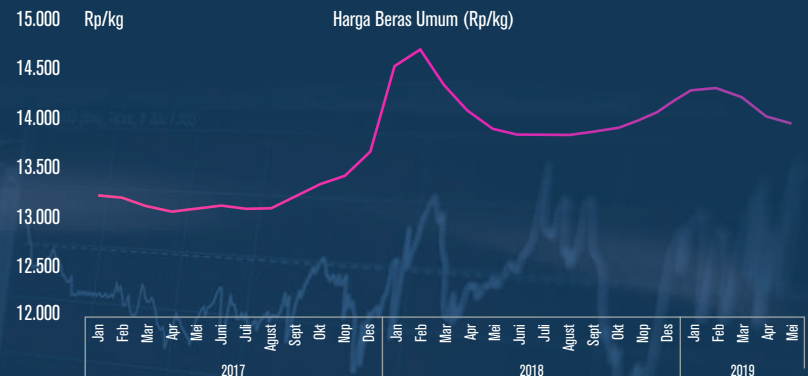
Harga Jagung Bagus

Rata-rata harga eceran jagung pipilan kering di tingkat pengecer pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 7.063/Kg atau naik sedikit sebesar 0,29 persen dibandingkan dengan harga pada April 2019.

Jika dibandingkan dengan harga pada Mei 2018, harga eceran jagung saat ini mengalami kenaikan yang cukup besar yakni 13,38 persen. Nilai koefisien keragaman harga eceran jagung di pasar domestik pada periode bulan Mei 2018 hingga Mei 2019 adalah sebesar 8,04 persen, dan cenderung meningkat dengan laju kenaikan sebesar 1,09 persen per bulan.

Sementara itu, pada periode yang sama, harga jagung di pasar dunia lebih stabil dengan koefisien keragaman sebesar 4,4 persen, dengan tren yang menurun sebesar 0,29 persen per bulan. Harga jagung dunia pada Mei 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,11 persen jika dibandingkan dengan harga pada bulan April 2019.

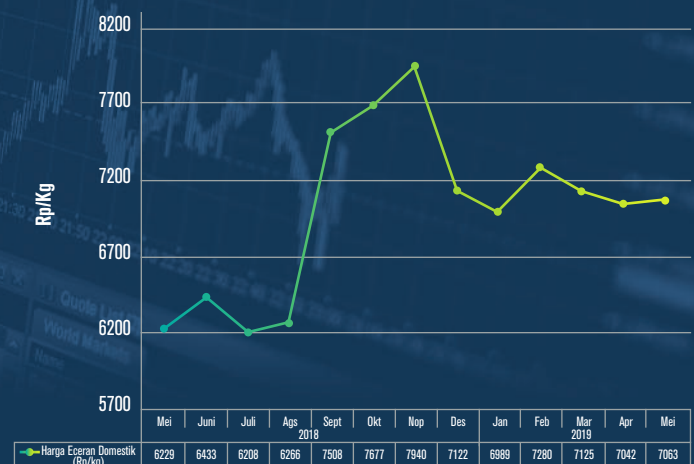
Perkembangan Harga Beras di Indonesia (Rp/kg), Mei 2019



http://bppp.kemendag.go.id/analisis_perkembangan_harga/view/MzQ5

Penurunan harga beras yang terjadi di bulan Mei 2019 sebesar -0,45 persen tersebut telah memberi andil terhadap deflasi sebesar -0,06 persen. Meski demikian secara total belum dapat meredam inflasi nasional selama bulan April 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen.

Perkembangan Harga Jagung Dalam Negeri 2018 - 2019



http://bppp.kemendag.go.id/analisis_perkembangan_harga/view/MzQ5

Sementara itu, jika dibandingkan dengan harga pada bulan Mei 2018, harga jagung dunia saat ini mengalami penurunan sebesar 3,23 persen.

Gold Perisai Risiko Global



Ari Riyanto

Direktur Marketing
PT HFX Internasional Berjangka

Kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global dan kemungkinan penghentian sementara siklus pengetatan moneter Amerika Serikat diperkirakan akan membuat harga emas terus naik di tahun 2019. Demikian menurut hasil jajak pendapat *Reuters*. Penyebab utama dari kenaikan harga emas dunia adalah kebijakan Bank Sentral AS, The Fed, yang cenderung melakukan pengetatan terhadap suku bunga, koreksi saham dan ketidakstabilan geopolitik yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. "Hal ini akan menjadikan penopang badai sempurna untuk menaikkan harga emas," kata Frederic Panizzutti dari MKS, seperti dikutip *Reuters*.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Cina dan perang dagang AS-Cina telah menjatuhkan pasar saham dunia dari rekor tertinggi tahun lalu dan semakin meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Hal ini membangkitkan kembali minat pada emas sebagai *safe haven*. Sementara itu, para ekonom dunia mengatakan *Federal Reserve* akan memperlambat laju kenaikan suku bunga, dan ditambah lagi analisa dari ahli strategi mata uang yang disurvei oleh *Reuters* percaya bahwa reli dolar sebagian besar telah berakhir.

Sementara harga emas dunia (XAU) pada bulan Juni melesat di atas USD 1.400 untuk pertama kalinya sejak 2013. Emas diperkirakan akan tetap mengalami potensi kenaikan sampai dengan akhir tahun 2019. Berdasarkan jajak pendapat dari 33 analis dan pedagang emas dunia menunjukkan angka perkiraan pergerakan harga emas akan berada pada *range* rata-rata USD 1.351 per ons tahun ini dan USD 1.433 pada tahun 2020.

Kenaikan harga emas dunia semakin diperkuat adanya kebijakan Bank Sentral yang membeli emas dalam jumlah yang besar dan pemangkasan suku bunga. Hal ini akan menggerakkan orang untuk investasi emas dalam proses mencapai resistensi tertingginya. Hal ini

juga disampaikan oleh Shallenberger (LBBW). Dengan adanya kebijakan pemotongan terhadap suku bunga AS secara tidak langsung akan melemahkan nilai mata uang dolar, dan akan semakin membantu emas dunia (XAU) akan jauh lebih menarik ketimbang komoditi yang lain ditambah juga memberikan imbal balik yang lebih tinggi dibanding imbal hasil obligasi.

Perkiraan kenaikan harga emas (XAU) jauh lebih tinggi daripada dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan tiga bulan lalu, sementara prediksi untuk perak menjadi jauh lebih pesimistis.

Dalam penelusuran penulis, media *Bloomberg* juga memberitakan, bahwa volatilitas terjadi di pasar saham, imbal hasil *US Treasury* tenor 10 tahun mendekati level terendah sejak 2017, dan bank-bank terbesar di Wall Street memperingatkan adanya peningkatan risiko resesi.

"Terdapat cukup elemen risiko dalam *outlook* ekonomi dunia, masih ada risiko geopolitik, mata uang tampak bergejolak, dan fakta bahwa pasar melihat risiko resesi, pasar modal jelas-jelas dalam ancaman," kata *Head of Market Analysis* untuk EMEA and Regional Asia di INTL FC Stone Inc Rhona O'Connell. Seiring volatilitas yang meningkat dan risiko koreksi di pasar modal, kita akan mulai melihat lebih banyak arus keluar investasi dari pasar modal ke pasar emas. Dan prediksi dari penulis bahwa pergerakan harga emas sampai dengan akhir 2019 akan berada pada level USD 1.365-USD 1.488 per troy ounce.

Bijaklah dalam melakukan transaksi dan investasi Anda, kenali risiko dan selalu melihat reaksi pasar global dan arah *market*. Jangan menggunakan emosi dan transaksi berdasarkan harapan tanpa mengetahui ilmu dan analisisnya.

Siapa Bisa Menjadi Pengelola SRG?



Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang mempunyai peran penting dalam menjaga integritas SRG karena bertugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh petani/keompok tani dan pelaku lainnya dimana Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Untuk itu Pengelola Gudang harus mempersiapkan dan mempertahankan dukungan keuangan dan kemampuan teknis yang memadai dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal.

Bappebti telah mengeluarkan persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa disetujui sebagai Pengelola Gudang SRG:

1. Calon Pengelola Gudang mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://srg.bappebti.go.id>
2. Memiliki SIUP dan NIB
3. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk badan usaha berbentuk PT/Perum) atau Pedoman Operasional Baku untuk Perusda atau Koperasi
4. Rencana usaha 3 tahun
5. Perjanjian standar pengelolaan barang
6. Salinan Persetujuan Gudang SRG atau tanda terima pengajuan permohonan persetujuan Gudang SRG
7. Daftar nama Pengurus/Direksi dan pegawai yang berhak menandatangani RG (daftar riwayat hidup, ijasah, surat kuasa/penugasan untuk menandatangani RG, NIK/Paspor, pas foto berwarna 4 x 6)
8. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan
9. Berita Acara Pemeriksaan sarana dan prasana fisik.

Selain ketentuan di atas Pengelola Gudang SRG juga harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. Ketentuan permodalan
 - a. Perseroan Terbatas (PT) / Perusahaan Umum (PERUM) Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

- b. Perusahaan Daerah (PERUSDA) Memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Koperasi Memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Memiliki tenaga atau personel dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.
3. Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh Persetujuan dari Bappebti sebagai Gudang SRG

Bappebti juga mengatur tentang tanggung jawab Pengelola Gudang SRG, yaitu:

- Menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau atas permintaan Pemegang Resi Gudang. (Pasal 25 PP NO. 36 Tahun 2007)
- Menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan (PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalankannya; (PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas; (PASAL 40 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Pengelola Gudang wajib mempertahankan kekayaan bersih minimal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas. (PASAL 41 PP NO. 36 TAHUN 2007)
- Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. (PASAL 23 UU NO. 9 TAHUN 2006)



CARA AMAN BERTRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

JADILAH INVESTOR YANG CERDAS

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.



SRG.mobile
Sistem Resi Gudang dalam Genggaman

apa keuntungan SRG.mobile?



Mudah mengetahui informasi seputar Sistem Resi Gudang, seperti lokasi gudang SRG terdekat, persyaratan memperoleh pembiayaan, perkiraan besar biaya pemanfaatan SRG, informasi harga komoditas.

Memudahkan transaksi Sistem Resi Gudang seperti rencana penyimpanan barang, pengajuan pembiayaan, maupun permintaan pengeluaran barang.

Sarana komunikasi dan konsultasi bagi pengguna aplikasi, pemilik barang, pengelola gudang maupun Badan Pengawas.

Penyebaran pengumuman / informasi baru terkait Sistem Resi Gudang dari BAPPEBTI kepada seluruh pengguna secara cepat dan akurat.

Memudahkan melakukan rencana pemasaran barang dengan mengetahui jadwal pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.

Download sekarang

